

Penyerahan Cinderamata dari Taruna ke Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi

Kotabumi: Detikperu.com (SMSI)- Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi, Mukhlisin Fardi Menyampaikan "Sebagai Magang, KKN dan Orlap Taruna Poltekip tahun 2021 kalian harus tingkatkan dan kembangkan terus kualitas dan kemampuan personal kalian untuk kemajuan organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin tidak mudah, semangat dan jangan pernah menyerah".

Dan terimakasih kepada rekan-rekan Taruna yang telah membuat satu inovasi yaitu Implementasi Jalur Evakuasi Darurat Guna Mengantisipasi Terjadinya Bencana Alam sehingga inovasi dapat berguna serta bermanfaat kedepannya". Ungkap Mukhlisin Fardi.

Ditempat yang sama, Kasubsi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto menjelaskan "Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari Magang yang dimulai dari 07 Juni – 14 Agustus 2021, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimulai dari tanggal 07 Juni – 16 Juli 2021 serta Orientasi Lapangan (Orlap) 01 Juli – 23 Juli 2021".

"Lanjutnya seluruh taruna telah melakukan kerjasama yang baik antar Taruna dengan Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi sehingga pelaksanaan kegiatan semakin kondusif, serta berjalan dengan efektif dan efisien".

Ganda selaku Taruna didampingi oleh rekan-rekan taruna mengungkapkan "kegiatan magang, KKN serta Orlap merupakan kegiatan sangat penting selain kewajiban dari kampus tetapi dapat memberi ilmu lapangan yang sangat bermanfaat yang tidak kami dapat di bangku perkuliahan, ungkapnya."

Lanjutnya, "terimakasih kepada kepala Rutan serta pejabat struktural dan seluruh pegawai Rutan Kotabumi". (DP/Rls)

Wujudkan Herd Immunity, Korp Marinir TNI AL Bersama Dinas Kesehatan Papua Barat Gelar Serbuan Vaksinasi Massal di Kota Sorong

Papua Barat: Detikperu.com (SMSI)- Upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di wilayah kerja Pasmars 3 terus dilakukan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan hingga mencapai target ke seluruh lapisan masyarakat. Bertepatan dengan bulan bhakti menyambut Hari Pramuka ke-60, Korps Marinir TNI AL bersama Dinas Kesehatan Papua Barat dan instansi terkait menggelar serbuan vaksinasi Covid-19 secara massal bertempat di halaman Kantor Kwartir Cabang Pramuka Kota Sorong, Jl. Jendral Sudirman, Distrik Malawei, Kota Sorong, Papua Barat. Kamis (05/08/2021).

Serbuan vaksinasi masyarakat maritim yang telah terselenggara tersebut dilaksanakan Pasmars 3 bersama Pemerintah Daerah Papua Barat sebagai salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 sekaligus membentuk Herd Immunity masyarakat. Selain itu juga, sebagai bentuk peran aktif dan aksi kemanusiaan TNI AL dalam memerangi Covid-19 yang diwujudkan dengan mengerahkan segenap tenaga maupun material dalam mencegah penyebarannya.

Sebanyak 1000 dosis vaksin jenis Sinovac untuk tahap pertama telah disiapkan, sedangkan untuk tenaga vaksinatornya adalah tenaga medis dari Balai Kesehatan Pasmars 3, Denkesyah Korem 181/PVT dan para tenaga medis UPTD Puskesmas Kota Sorong.

Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni, S.H., M.Si., Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, Wadan Pasmar 3 Kolonel Mar Agung Trisnanto, Asintel Danpasmar 3 Kolonel Mar Profs Dhegratmen SA, M.Tr.Hanla, Dandim 1802/Sorong Letkol Inf Budiman,SE., Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan S.I.P dan disambut antusias oleh warga masyarakat. Sebagian masyarakat ingin divaksin karena ada rencana bepergian sehingga membutuhkan sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan.

Dikatakan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si, bahwa Bakti Pramuka berpusat di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong karena merupakan daerah yang berdekatan dan memiliki mobilitas penduduk cukup tinggi dimana setiap saat dan waktu saling bersinggungan.

Di tempat berbeda, Komandan Pasmar 3 Kolonel Mar Y. Rudy Sulistyanto S.E mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi ini juga bagian dari upaya Korps Marinir TNI AL khususnya Pasmar 3 bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama dalam rangka menekan dan mengendalikan laju perkembangan pandemi Covid-19.

Sementara itu, serbuan vaksinasi massal yang diprakarsai oleh Pasmar 3 bersama Dinas Kesehatan Papua Barat dalam menyambut Hari Pramuka ke-60 juga dilaksanakan di Alun-alun Kota Baru Aimas, Puskesmas Mariat dan Puskesmas Mayamuk Kabupaten Sorong. (DP/Rls)

Personil Gabungan TNI POLRI

Gelar Operasi Yustisi Penegakan Prokes

Wonogiri: Detikperu.com- Berbagai upaya terus dilakukan TNI-Polri di Ngawi untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid 19. Salah satunya seperti yang dilaksanakan Anggota Koramil 23/Karangtengah dan Polsek Karangtengah mengadakan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, Kamis (5/8/2021).

Serka kasiman anggota Koramil 23/Karangtengah mengatakan, kegiatan operasi yustisi ini bertujuan menertibkan penggunaan masker. Kemudian memberikan teguran dan anjuran penggunaan masker kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melintas.

“Kami juga menghimbau masyarakat agar selalu rajin cuci tangan dengan sabun air mengalir, menjaga jarak aman mengurangi kontak fisik serta senantiasa menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang bergizi,” ujarnya.

Sejumlah personil gabungan, baik dari Personil TNI-Polri memberikan edukasi dan mengingatkan sekaligus mendisiplinkan serta menyadarkan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan salah satunya penggunaan masker, guna mencegah penyebaran Covid 19.

Disisi lain ia menyatakan, TNI-Polri dan instansi terkait lainnya selalu berkoordinasi dan saling bekerja sama mendukung pemerintah untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid 19. Diharapkan dengan adanya kegiatan operasi yustisi, masyarakat semakin sadar dan paham betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid 19.

Penulis: (Arda 72)

Laksanakan Perintah Pimpinan, Babinsa Aktif Dampingi Tenaga Medis Laksanakan Tracing

Wonogiri: Detikperu.com- Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjadi ujung tombak TNI AD untuk memutus penyebaran Covid-19 di tanah air. Sinergi dengan jajaran terkait baik bersama Polri, pemerintah daerah bahkan Satgas Penanggulangan Covid-19 terus dilakukan. Tak hanya itu, pendekatan di tengah masyarakat juga makin digencarkan guna menumbuhkan semangat bersama untuk melawan Covid-19.

Menindaklanjuti instruksi dari Panglima TNI, Koramil jajaran Kodim 0728/Wonogiri turut mengerahkan Babinsa untuk terjun di tengah masyarakat. Salah satunya ditunjukkan Babinsa bersama petugas Puskesmas setempat untuk melacak kontak erat atau tracing dari warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Komandan Koramil (Danramil) 03/Ngadirojo Kpt Inf Sunardi mengatakan tracing menjadi hal wajib bagi Satgas Penanggulangan Covid-19 dalam rangka memutus mata rantai penularan Virus Corona.

“Oleh sebab Babinsa dilibatkan dalam kegiatan tracing. Babinsa bisa membantu tim dalam mengevakuasi warga terkait perlunya mengikuti tes swab maupun rapid antigen,” terang Danramil, Kamis (5/8/2021).

Awalnya banyak warga yang menolak dilakukannya tracing, namun berkat pendekatan dan komunikasi yang dilakukan Babinsa serta tim akhirnya masyarakat bisa memahami jika melawan Covid-19 harus membutuhkan peran serta bersama. “Persentase yang menolak kini sedikit. Mulai tumbuh kesadaran di tengah warga,”

ucapnya.

Sementara itu Babinsa Koramil 03/Ngadirojo, Serda Riwanto Babinsa Ngadirojo kidul menerangkan apa yang dilakukannya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. Ia menyadari tugas yang diembannya sangat berpotensi tertular Covid-19, namun dengan mematuhi protokol kesehatan semua akan mampu dilaluinya.

“Tak hanya tracing, para Babinsa juga rutin melakukan himbauan kepada warga agar tetap mematuhi prokes untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga menghindari kerumunan serta mengurangi aktivitas di luar rumah,” jelasnya.

Penulis: (Arda 72)

Guna Berikan Keamanan, Babinsa Dampingi Pembagian BLT DD

Wonogiri: Detikperu.com- Babinsa Desa Temboro Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Sertu Sutrisno melakukan pendampingan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Dana Desa (BLT-DD) bertempat di balai Desa Temboro Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri, kepada warga kurang mampu terdampak pandemic Covid-19.

Pada kegiatan tersebut, Babinsa menyampaikan, bahwa bantuan yang diberikan kepada warga kurang mampu ini bersumber dari dana desa sesuai dengan instruksi Kemendes untuk mengalihkan sebagian dana desa dalam menangani wabah Covid-19. Diberikan kepada 74 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19.

“Pendampingan ini juga dilakukan untuk menertibkan penyaluran BLT-DD agar berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Dikatakan juga oleh Sertu Sutrisno, selain melakukan pendampingan, dirinya juga memberikan himbauan dan edukasi tentang memutus penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Sebelum memasuki ruangan, masing-masing penerima diminta untuk mencuci tangan, memakai masker dan selalu menjaga jarak pada saat kegiatan,” pungkasnya.

Penulis: (Arda 72)

Petugas Gabungan Gelar Gakplin Prokes Pada Malam Hari

Wonogiri: Detikperu.com- Guna mencegah penambahan kasus terkonfirmasi positif di Kecamatan Batuwarno petugas gabungan mempergencar patroli penegakan protokol kesehatan baik malam maupun siang hari guna untuk mendisiplinkan masyarakat mematuhi prokes di masa pemberlakuan PPKM Darurat. Rabu (4/8) malam.

Kali ini tempat-tempat keramaian menjadi sasaran patroli penegakan protokol kesehatan dan sosialisasi PPKM Darurat.

Serda Setyobudi yang tergabung dalam kegiatan patroli malam mengatakan tujuan dari patroli ini adalah untuk mendisiplinkan warga yang belum mematuhi prokes di masa pandemi ini.

“Agar warga mengerti akan pentingnya mematuhi prokes karena

dengan warga mematuhi sudah membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19, khususnya di wilayah Kecamatan Batuwarno,” katanya.

Disamping melaksanakan patroli penegakan prokes, petugas gabungan juga menyampaikan sosialisasi aturan-aturan PPKM Darurat guna untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Masih ditemui warga yang belum mematuhi prokes melanggar batas jam malam. Kepada warga diberikan edukasi tentang prokes dan diminta untuk memakai masker apabila kegiatan keluar rumah, kepada warga diberikan arahan dan penjelasan sesuai Surat Edaran Bupati tentang Perpanjangan PPKM Darurat,” jelasnya.

“Dengan warga patuhi prokes dan PPKM Darurat diharapkan pandemi Covid-19 bisa ditekan penyebarannya di wilayah Kecamatan Batuwarno,” harapnya.

Petugas gabungan selama kegiatan juga mengimbau kepada warga untuk selalu memakai masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun serta terapkan pola hidup sehat agar kita semua terhindar dari Covid-19.

Penulis: (Arda 72)

Berantas Peredaran Gelap Narkoba, 19 Narapidana Kasus Narkoba Di pindah ke Super

Maksimum NK

Lampung: Detikperu.com (SMSI)- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan UPT Pemasyarakatan Jajaran Kantor Wilayah Lampung Melakukan Pemindahan kepada 19 Narapidana High Risk dari Seluruh Lapas Di Lampung ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusa Kambangan pada Rabu, (4/8).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Kadivpas Lampung, Kalapas, dan Karutan Wilayah Lampung.

Narapidana yang dipindahkan adalah Pengendali Aktif Narkoba dan Bandar Narkoba yang termasuk dalam Narapidana High Risk (Risiko Tinggi)

Tak main-main, kegiatan Pemindahan Narapidana ke Lapas yang memiliki Pengamanan Super Maksimum ini merupakan Komitmen dari Divisi Pemasyarakatan dan Jajaran, untuk memberantas Peredaran Gelap Narkoba di Lapas/Rutan.

Kadivpas Lampung, Farid Junaedi mengatakan bahwa pihaknya tidak main-main terhadap pelaku Bandar Narkoba dan Pengendalinya.

“Kami tidak main main, akan memindahkan dan mengirim Narapidana ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan bagi Bandar dan pengendali narkoba,” tegas Farid.

Dalam kesempatan itu juga, Plt. Kakanwil Lampung, Iwan Santoso, memberikan motivasi kepada petugas untuk terus berkomitmen perang melawan narkoba.

“Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di dalam Lapas/Rutan, dan Untuk Petugas Lapas yang bermain Narkoba akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku dan

akan kami kirim ke Nusa Kambangan,” ucap Iwan. (DP/Rls)

Polres Tulang Bawang Tangkap Pria Asal Lampung Utara di Dalam Mess Karyawan

Tulang Bawang: Detikperu.com- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tulang Bawang berhasil mengungkap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukumnya.

Pelaku ditangkap hari Selasa (03/08/2021), pukul 21.00 WIB, di dalam mess karyawan, PT Gita Omega Distrindo (GOD), Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

“Pelaku yang ditangkap ini berinisial HH (32), berprofesi wiraswasta, warga Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara,” ujar Kasatres Narkoba AKP Anton Saputra, SH, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswanto, SIK, Kamis (05/08/2021).

Lanjut AKP Anton, dari lokasi penangkapan petugas kami berhasil menyita barang bukti (BB) berupa satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram, satu buah tabung pipa kaca (pyrex), dan satu buah alat hisap sabu (bong).

Kasat menjelaskan, keberhasilan petugasnya dalam mengungkap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini merupakan hasil penyelidikan di wilayah Kecamatan Banjar Agung.

Informasi yang didapat bahwa salah satu mess karyawan milik PT

Gita Omega Distrindo (GOD), Kampung Tunggal Warga, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

“Petugas kami langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan di dalam mess karyawan tersebut terdapat seorang laki-laki. Setelah dilakukan penggeledahan petugas kami menemukan BB berupa narkoba jenis sabu dan bong,” jelas AKP Anton.

Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang dan akan dikenakan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 Miliar dan paling banyak Rp 10 Miliar. (*)

Taman Merah Putih Menjadi Program Strategis dan Unggulan Pemkab Tuba

Tulang Bawang: Detikperu.com- Bupati Tulang Bawang Dr.Hj. Winarti, S.E., M.H. telah menetapkan dan mencanangkan Taman Kecamatan Banjar Agung menjadi salah satu Program Strategis dan Unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021.

Taman Kecamatan Banjar Agung yang berlokasi di Kampung Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung di sebelah Balai Kampung Tri Tunggal Jaya dan dipinggir Ruas Jalan Ronggolawe – Moris Jaya tersebut merupakan Ide dan Gagasan dari Ibu Bupati Tulang

Bawang Dr.Hj. Winarti, S.E., M.H. yang mengusung Tema “ Merah Putih “. Taman dan berfilosofi “ Keragaman Adat Budaya Suku di Tulang Bawang Bersatu Dalam Balutan Bendera Merah Putih NKRI.

Taman Merah Putih tersebut akan dilengkapi dengan Tugu Merah Putih, Patung Pasangan Suku Adat yang ada di Tulang Bawang, Jogging Track, Ruang Terbuka Hijau dan Arena Permainan Anak – Anak lengkap dengan alat permainannya.

Taman Merah Putih diharapkan menjadi tempat berkumpulnya semua kalangan sehingga rasa senang, gembira dan bahagia ketika berkunjung ke taman tersebut.

Sesuai dengan arahan dan instruksi Ibu Bupati Tulang Bawang Dr.Hj. Winarti, S.E., M.H. Kepala Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang, M.Puncak Setiawan, S.P.,M.M. yang diwakili oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Abdul Latief Gunawan. S.T melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan Rapat Penyerahan Lokasi Pekerjaan pada Paket Pekerjaan Kepada Penyedia CV. MESSTHABOH PERDANA

Abdul Latief Gunawan. S.T didampingi oleh Kasi Gedung dan Bangunan serta Tim Teknis dan Konsultan Pengawas dan dihadiri oleh Sekretaris Kampung Tri Tunggal Jaya Bapak Rasidi yang mewakili Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya. Selasa (04/08/2021). (HR/SN)

Komunikasi Penanganan Wabah Memburuk, SMSI Ingatkan

Kemenkominfo

Jakarta: Detikperu.com (SMSI)— Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali pulih khususnya dalam kerangka penanganan wabah COVID-19 yang bermuara pada pemulihan ekonomi.

Tentu ini dengan sejumlah catatan yang melandasinya. Kerangka pertama, adalah dengan memfokuskan komunikasi pada satu pintu. Tidak lagi menggunakan banyak pintu, sehingga pesan dan kebijakan yang ditetapkan Presiden Jokowi sampai dan tidak menimbulkan kegamangan dan berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

Sebenarnya, sambung Firdaus, pintu komunikasi paling strategis melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). "Sayangnya hingga hari ini, Kominfo tidak memainkan peran itu. Tidak ada capaian maksimal yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Kemenkominfo. Direct message dari Istana tidak sampai ke publik," terang Firdaus, Rabu (4/8/2021).

Urusan data sebaran wabah COVID-19 di daerah hingga jumlah pasien yang terkontaminasi misalnya, semua bertumpu pada BNPB. Padahal, beban dan tugas BNPB bukan pada urusan menyebarkan data apalagi informasi. BNPB lebih pada proses penanganan kebencanaan. Meskipun, kini COVID-19 juga masuk dalam urgensi kerja BNPB. Hingga saat ini, dari seribu lebih media yang tergabung di SMSI, satupun belum ada yang tersentuh. Ini mungkin karena beratnya tugas BNPB.

Setelah BNPB, tugas yang berat dari sisi komunikasi kini ada di pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Fakta ini begitu kasat mata, jika dilihat dari pola kerja yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Hampir setiap hari, turun ke lapangan melakukan cross check information di daerah, baik yang berkaitan dengan program

vaksinasi, hingga pengendalian wabah.

"Lihat saja urusan penanganan dan informasi sebaran vaksin sampai obat. Semua informasi tertuju di Kemenkes dan BNPB. Artinya, Kemenkominfo tidak akan mampu menjawab semua yang dibutuhkan publik khususnya soal informasi data," tandasnya.

Lalu apa tugas Kemenkominfo? Mantan Ketua PWI Banten dua periode ini menilai, fungsi komunikasinya Kemenkominfo di bawah kendali Menteri Johnny G. Plate tidak berjalan. Sangat jauh dari harapan.

"Jangankan soal data sebaran wabah dan urusan informasi vaksin dan kebijakan yang dikeluarkan Presiden, untuk urusan bagaimana menyampaikan manfaat dari kebijakan PPKM saja, nyaris semua media terfokus pada informasi yang disajikan BNPB atau Kemenkes, bukan Kemenkominfo yang seharusnya bisa menyampaikan pesan ini," terang Firdaus.

Wajar, sambung dia, jika hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) 20-25 Juni 2021 lalu, menunjukkan angka-angka demikian. Kepercayaan terhadap Presiden Jokowi terkoyak lantaran komando komunikasi tidak berjalan.

Data LSI jelas terpampang. Maka wajar pula, jika Presiden segera mengganti Johnny G. Plate dari kursi menteri. Cari sosok yang ideal yang mampu bekerja sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Karena jelas-jelas pola kerja Kemenkominfo tidak dirasakan.

"Silahkan tanya rekan-rekan media atau pemerhati komunikasi, apa manfaat dari Kemenkominfo di saat seperti ini. Lalu mengapa demikian? SMSI yakin Presiden punya catatan sendiri," jelas Firdaus.

Jika fakta-fakta ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi. Kegamangan di masyarakat terhadap langkah kinerja Presiden tidak terlihat dan dirasakan. Sementara akar persoalan nasional terkait naiknya angka

pengangguran, kemiskinan dan buruknya sisi kesehatan terus menjadi 'hantu' di republik ini.

"Ya, bukannya membaik tapi semakin buruk. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka dampaknya terus meluas. Komunikasi dalam penanganan wabah akan terus memburuk. Publik resah hingga akhirnya, berita-berita negatif begitu deras berselancar di ponsel masyarakat. Karena pola komunikasi dan informasi tidak searah. Kemenkominfo tidak bisa memainkan peran strategisnya," terangnya.

Faktor kedua, Kemenkominfo harus mampu memainkan perannya sebagai jembatan penghubung dengan menggandeng lembaga atau asosiasi media, tokoh publik, tokoh agama baik nasional dan daerah dalam menyampaikan pesan-pesan Pemerintah Pusat yang diharapkan berimplikasi positif di masyarakat.

"Pola kerja dalam menggandeng media dan tokoh publik saja tidak terlihat yang dilakukan Kemenkominfo. Johnny G. Plate lebih asyik bermain sendiri dengan konsep kerjanya. Jujur saja kami kecewa, Kemenkominfo tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi saat ini," tegas Firdaus.

Sebagai serikat media, sambung Firdaus, SMSI hanya mengingatkan, memberikan warning kepada Kemenkominfo untuk lebih lunak dan fleksibel dalam membuat terobosan dalam sisi komunikasi sebagai upaya membantu pemulihan kondisi bangsa.

"Kami berharap Johnny G. Plate sadar dengan kondisi dan fakta-fakta ini. Sadar pula bahwa Kementerian di bawah komandonya belum bisa berbuat banyak, lantaran sisi komunikasi tidak berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Presiden Jokowi juga bisa memaknai kritik ini sebagai landasan. Satu harapan kami, Indonesia lekas sembuh," tutup Firdaus.

Senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prof.Dr. Moestopo (beragama) Taufiqurokhman.

Dalam penegasannya Taufiqurokhman melihat munculnya hasil Survei LSI terkait trend Presiden Jokowi menurun, sampai di bawah 50 persen karena ternyata pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan penyebaran Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa Bali dan seluruh Indonesia.

"Hanya beberapa negara secara sistematis dan masif penyelesaiannya. Baik dari testing, tracing treatment. Soal pelaksanaan PPKM Darurat yang dianggap gagal malah dilanjutkan oleh pemerintah pusat yang lagi-lagi aturannya sangat tidak siap dilaksanakan. Jadi wajar kalau lampu kuning masyarakat menyala kepada pemerintahan Presiden Jokowi," teranginya.

Bahkan sambung Taufiqurokhman, kini muncul bendera putih setengah tiang berkibar lantaran publik menyerah dengan kondisi saat ini. "Lalu apa yang harus dilakukan? Presiden Jokowi sudah benar menggenjot agar bansos segera dibagikan ke masyarakat. Karena selama PPKM darurat hampir tidak ada bansos untuk masyarakat yang terdampak," jelasnya.

Terkait adanya permintaan dari masyarakat agar Rapid Test, PCR atau Swab digratiskan bagi masyarakat hal ini sangat relevan. "Jangan seperti PPKM Darurat jumlah testing menurun lantas diklaim sebagai keberhasilan. Sungguh sangat bahaya mengambil kesimpulan dengan permasalahan yang kurang tepat treatmentnya," jelasnya.

Taufiqurokhman juga menilai Kemenkominfo harus mengambil peran-peran strategis dalam pemberitaan dan memberikan siaran beredukasi. "Banyak televisi yang menyiarkan menakut-nakuti masyarakat. Lalu apa peran Kemenkominfo. Maka berikan informasi seperti yang diharapkan Presiden Jokowi yakni informasi positif yang menyebar optimisme," imbuhnya.

Selanjutnya, Kemenkominfo juga harus menggandeng perguruan tinggi yang masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Perguruan Tinggi swasta dan negeri harus digandeng dalam vaksinasi gratis buat mahasiswa dan dosen serta masyarakat sekitarnya.

"Perguruan tinggi porsinya diberikan lebih untuk tampil menyebarkan berita positif atau memberikan penyebar optimisme. Jangan terlampau banyak para politisi yang jelas berkepentingan utk menaikkan citra partai atau hanya cari popularitas. Berikan kegiatan-kegiatan positif pada perguruan tinggi agar mendukung menyebarkan berita positif atau optimisme," paparnya.

Menanggapi kondisi saat ini, Praktisi media sekaligus pengamat sosial Dhiman Abror juga angkat bicara. Dikatakannya, dalam perspektif survei dan polling, tingkat kepercayaan terhadap seorang pemimpin yang naik turun adalah fenomena biasa.

"Para pemimpin dunia pun mengalami fenomena yang sama, ketika dia membuat kebijakan populer dan membuat senang masyarakat pasti popularitas dan kepercayaan publik naik. Sebaliknya kalau dia membuat kebijakan yang tidak populer maka kepercayaan publik akan turun," jelas mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos ini.

Dikatakan Dhiman, kebijakan PPKM yang diambil Presiden Jokowi kali ini tidak populer di mata masyarakat, selain itu, penanganan pandemi secara umum oleh pemerintah dianggap kurang efektif, karena itu kepercayaan masyarakat pun turun.

"Otomatis kredibilitas pemimpin itu turun di mata masyarakat, dia juga akan dianggap sebagai pemimpin yang kurang efektif. Kalau dikaitkan dengan perhelatan pilpres para ahli survei akan melihat angka di bawah 50 persen bagi petahana ini sudah masuk kategori lampu kuning yang harus diwaspadai," urai Dhiman.

Dirinya pun mengkritisi sikap posisi Kemenkominfo. "Ya Kemenkominfo tentu tidak bisa bekerja sendirian karena persoalannya kompleks. Tetapi kominfo seharusnya bisa memainkan fungsi yang lebih efektif dalam mendesain dan mengeksekusi komunikasi politik pemerintah. Dalam hal ini masih sangat banyak kelemahan yang ada di kominfo," ungkapnya.

Lalu apa yang harus dilakukan Kemenkominfo sebagai salah satu Kementerian yang memiliki tupoksi komunikasi lintas sektoral, untuk meningkatkan kepercayaan publik ini?

Dhiman berharap Kemenkominfo harus lebih bisa merangkul semua elemen masyarakat supaya komunikasi politik pemerintah lebih efektif. Kominfo bisa lebih mengintensifkan kerjasama dengan "opinion leader" dan "opinion maker" dari kalangan masyarakat.

"Kemenkominfo harus melakukan pendekatan lebih intensif dengan para pemimpin informal di kalangan masyarakat. Selain itu Kominfo harus lebih intensif bekerjasama dengan media yang bisa menjadi ujung tombak komunikasi massa dengan masyarakat," jelasnya.

Akademisi Untirta Boyke Pribadi juga menguraikan beberapa hal yang menjadi faktor menurunnya tren kepercayaan publik terhadap Jokowi. Salah satunya disebabkan karena komunikasi yang tidak terarah.

Kesimpangsiuran informasi dan adanya ketidak konsistenan informasi dari atas sampai bawah ditambah dengan kepanikan masyarakat di era pandemi yang cenderung menyimpulkan informasi dengan cepat sesuai selera pribadi ditambah dengan pesatnya teknologi informasi yang mempercepat tersebarnya.

Kabar hoaks atau informasi bohong menyebar begitu deras. Padahal ini terkait kepercayaan kepada kepemimpinan Full Trust society adalah kondisinya sangat sempurna bagi kepemimpinan, dan kondisi rawan ada pada tingkat low trust atau bahkan zero trust society.

"Kemenkominfo harus berperan optimal dalam menjembatani komunikasi antara atas dan bawah hanya saja kominfo disibukkan dengan mengatasi persoalan hoaks," tandasnya.

Johnny G. Plate harus meniru gaya Harmoko untuk menjembatani komunikasi antara Presiden dengan masyarakat. "Pada masa Harmoko sangat dikenal komunikasi efektif Dengan memanfaatkan

media. Dalam kondisi sulit seperti ini, agar seluruh informasi tidak bias, jika kementerian tidak dapat berdiri di tengah, mungkin agar komunikasi dapat efektif dapat mengoptimalkan komunikasi milik pemerintah Seperti TVRI dan RRI," urainya.

Boyke Pribadi yang juga Ketua ICMI orwil Banten, meminta Kemenkominfo untuk membangkitkan modal sosial bangsa menuju full trust society, dengan mengurangi blunder-blunder berkomunikasi yang terjadi dan mampu memanfaatkan media media milik pemerintah agar menjadi media yang sangat terpercaya.

"Berikan masyarakat bukti bukan hanya janji. Janji-janji manis sangat tidak diperlukan pada masyarakat dengan kondisi low trust atau bahkan zero trust dengan demikian kita bisa keluar dari kondisi pandemi dengan baik," timpal Boyke Pribadi.

Dugaan ketidak-adilan Kemkominfo dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut "Berkah Presiden Jokowi", karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber. Protes ketidakpercayaan tersebut, terungkap dari berbagai media di daerah untuk Peninjauan ulang Kegiatan Diseminasi KPCPEN di Kemenkominfo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atas surat dari SMSI dan konfirmasi dari kementerian (ful/smsi)